BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN POTENSI PARIWISATA

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).[1] Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Kebebasan yang dimaksud bisa diciptakan kelompok itu sendiri atau melalui fasilitasi pemerintah.

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang atau jasa-jasa yang mereka perlukan.

---

[1] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 57

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.[2]

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering, and subtainable*.[3]

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata mempengaruhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap pertumbuhan-pertumbuhan di masa lalu.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tigas sisi, yaitu :

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

---

[2] *Ibid*., h. 57
[3] *Ibid*, h. 99

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini juga meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, jembatan, maupun sekolah dan juga fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta kesediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada lapisan masyarakat ini.

c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.[4]

---

[4] *Ibid*, h. 102

2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut catatan Ife dalam bukunya Miftahul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni *power* dan *disadvantaged*.

a. Kekuasaan

Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.

b. Kekurang beruntungan

Lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung, sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural dan personal.[5]

Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa hakikat pemberdayaan ialah mendorong kekuatan masyarakat untuk membuka akses yang seluas-luasnya agar tidak terjadi monopoli dan dominasi kekuasaan, sehingga kelompok masyarakat

---

[5] Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 272-273

mampu memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.

3. Bentuk-bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Menurut Taliziduhu Ndraha, diperlukan berbagai program pemberdayaan, di antaranya :

a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar yang diperintah terhadap pemerintah. Daya tawar ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki kualitas kehidupan kerja yagn tinggi dan berorientasi kepada: partisipasi dalam pengambilan keputusan, program pengembangan karir, gaya kepemimpinan, derajat tekanan yang dialami oleh karyawan dan budaya organisasi.
b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program dan akibat kerusakan lingkungan.

c. Pemberdayaan sosial budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* untuk menciptakan daya guna dan perlakuan yang adil terhadap manusia.

d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan. [6]

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu :

a. Bantuan modal

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi menjadi faktor penting yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, ada dua hal penting yang perlu dicermati, yaitu pertama, lemahnya ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha, tetapi juga masyarakat yang tidak mempunyai faktor produksi atau masyarakat yang pendapatannya bergantung pada gaji. Dalam pemberdayaan aspek ini, nampaknya pemberdayaan masyarakat perlu dipikirkan bersama. Kedua, perlunya mencermati usaha

---

[6] Taliziduhu Ndraha, *Kronologi: Ilmu Pemerintahan Baru*, (Jakarta: Direksi Cipta, 2003), h. 132

pemberdayaan masyarakat melalui aspek permodalan ini adalah bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru melalui usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; dan bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

b. Bantuan pembangunan prasarana

Usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah mereka melakukan aktivitasnya.

c. Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk masyarakat.

d. Kelembagaan

Keberadaan sebuah lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain mereka dilatih untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi

masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah dan lain sebagainya.[7]

Keempat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam menunjang dan mempercepat akselerasi kualitas hidup masyarakat yang pada awalnya belum berdaya menjadi berdaya dan mandiri.

4. Aktor Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagai berikut :

a. Peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini. Dalam rangka ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan:
   1) Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
   2) Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.

---

[7] Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis dan Implementasi*, (Jakarta: Bappenas, 2000), h. 7-10

3) Birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian.
4) Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan agar aparat dengan segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
5) Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
6) Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Untuk dapat menjalankan misinya, maka birokrasi harus ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, dan ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hirarkis seperti aparat desa dan kecamatan, maupun fungsional seperti guru, dokter dan bidan.

b. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai potensi besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program

pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya LSM, sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri.

c. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasiformal seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, Pokdarwis atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok paketan dan sebagainya.[8]

B. Potensi Pariwisata

1. Pengertian Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata adalah potensi dari berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Kepariwisataan berarti keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.[9]

---

[8] *Ibid*, h. 22-23

[9] Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Parisiwata*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 55

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, tujuan kepariwisataan yaitu :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. Menghapus kemiskinan
d. Mengatasi pengangguran
e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
f. Memajukan kebudayaan
g. Mengangkat citra bangsa
h. Memupuk rasa cinta tanah air
i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Menurut Sedarmayanti, untuk mengembangkan kegiatan wisata daerah, tujuan wisata harus memiliki:

a. Objek/atraksi dan daya tarik wisata
b. Transportasi dan infrastruktur
c. Akomodasi (tempat menginap)
d. Usaha makanan dan minuman

e. Jasa pendukung lainnya (hal yang mendukung kelancaran berwisata, misal: biro perjalanan, cinderamata, informasi, pemandu, kantor pos, bank, penukaran uang, internet, wartel, pulsa, salon dan lain-lain).[10]

Sumber daya manusia di bidang pariwisata dikelompokkan menjadi :

a. Sumber daya manusia berada di lembaga pemerintahan: menghasilkan kebijakan/pembangunan pariwisata.
b. Sumber daya manusia berada di lembaga pendidikan namun belum terlibat langsung usaha pariwisata, terdiri dari: manajemen/karyawan, pendidik, anak didik.
c. Sumber daya manusia terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, pihak yang berperan menghasilkan produk dan/jasa bagi wisatawan dalam kegiatan usaha formal, terdiri dari:
   1) Pengelola usaha pariwisata, meliputi: pengusaha sektor formal usaha pariwisata yang mengelola berbagai usaha pariwisata
   2) Pekerja/karyawan usaha pariwisata yang bernaung di bawah satu usaha pariwisata lembaga formal
d. Masyarakat berada di luar sektor lembaga formal, namun terkait bisnis pariwisata.
   1) Berkaitan pariwisata sebagai industri, maka sumber daya manusia pariwisata adalah sumber daya manusia yang terlibat dan menghasilkan kebutuhan wisatawan di usaha pariwisataan meliputi: daya tarik wisata,

[10] *Ibid*, h. 56

kawasan wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makan dan minum, akomodasi, penyelenggaraan: hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan, konferensi dan pameran, jasa: informasi pariwisata, konsultan pariwisata, pramusiwata, wisata tirta dan spa dan lain-lain.

2) Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam memajukan sektor pariwisata.
3) Pentingnya sumber daya manusia di bidang pariwisata merupakan sumber daya penting untuk mewujudkan keberhasilan kepariwisataan.
4) Pada industri pariwisata, perusahaan memiliki hubungan langsung dengan konsumen yang sangat bergantung pada kemampuan karyawan dalam membangkitkan minat dan menciptakan kesenangan serta kenyamanan konsumennya.
5) Pengalaman tamu/konsumen dalam industri pariwisata merupakan aktivitas yang memiliki intensitas tinggi dan tidak mudah ditiru/ disediakan industri jasa lain.[11]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi pariwisata merupakan keunggulan seluruh sumber daya atau objek pariwisata, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menyejahterakan kehidupan masyarakat, dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Potensi pariwisata pada dasarnya terletak pada sumber daya manusia pariwisata yang merupakan aspek pendukung kegiatan wisata. Peran penting keberadaan sumber daya manusia di

[11] *Ibid*, h. 63-64

industri pariwisata, sebagai pencipta penggerak kelangsungan industri pelaku utama produk inti pariwisata dan faktor penentu daya saing.

2. Desa Pariwisata

Desa Wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomidasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatau dalam tata cara dan tradisi yang berlaku.[12] Menurut Soetarso Priasukmana, pembangunan desa wisata bertujuan untuk:

a. Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata dengan menyediakan obyek wisata yang alternatif
b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakt sekitar
c. Memperluas alapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi desa
d. Mendorong masyarakat kota yang relatif memiliki tingkat perekonomian yang mapan agar dapat berkunjung ke desa untuk berwisata (*ruralisasi*)
e. Menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat desa untuk tetap tinggal didesanya serta mengurangi tingkat urbanisasi
f. Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan orang pribumi.

---

[12] Yoeti A. Oka, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 71

g. Memperkokoh persatuan bangsa sehingga bisa mengatasi disintegrasi[13]

Pentingnya suatu pendekatan dalam proses pembangunan pemodelan agar dalam upaya pembangunan tetap berorientasi kepada kepentingan masyarakat setempat, lingkungan dan peletakan/pembagian zonasi yang tepat dan penataan. Lanskap yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan kualitas lingkungan masyarakat, dasar utama yang senantiasa harus dijaga keutuhannya, sehingga situasi konflik tidak akan timbul bila langkah-langkah pendekatan dengan segala kearifan untuk memenuhi fungsi-fungsi timbal balik, estetika, rekreatif, ilmiah dan konservasi.
b. Pendekatan perencanaan fisik yang meliputi daya tampung ruang, pemilihan daya tampung ruang, pemilihan lokasi yang tepat serta peletakan zonasi yang seimbang antara zona inti, zona penyangga, dan zona pelayanan, fisis, tanah, air dan iklim biotis.
c. Pendekatan terhadap unsur-unsur pariwisata yang dapat dibangun dalam hubungan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas bagi wisatawan.
d. Pendekatan dasar rencana tapak yang berkaitan dengan peletakan fisik, sistem transportasi, sistem utilitas tipologis, pola penghijauan, pola disain/arsitektural, tata bangunan, topografi, iklim, desain lanskap.

---

[13] Soetarso Priasukmana, *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah*, (Jurnal: Info Sosial Ekonomi, 2001), Vol 1. No. 1

e. Pendekatan struktur geo-klimatologis dan geo-morfologis setempat harus mendukung kesuburan dan keindahan seperti karakter, pegunungan/ perbukitan yang indah, udara yang sejuk serta kondisi hidrologis yang memungkinkan, budi daya pertanian berkembang. Hubungan antara wisatawan dan penduduk setempat dan melindungi masyarakat dari melimpahnya kegiatan pariwisata.[14]

3. Pengembangan Wilayah Pariwisata

Pengembangan suatu objek wisata harus dapat menciptakan *product style* yang baik, dimana diantaranya adalah :

a. Objek tersebut memiliki daya tarik untuk disaksikan maupun dipelajari.
b. Mempunyai kekhususan dan berbeda dari objek yang lainnya.
c. Tersedianya fasilitas wisata.
d. Dilengkapi dengan sarana-sarana akomodasi, telekomunikasi, transportasi dan sarana pendukung lainnya.

Menurut Yoeti A. Oka, bahwa pengembangan objek wisata pada dasarnya mencakup tiga hal, yaitu :

a. Pembinaan produk wisata

   Merupakan usaha meningkatkan mutu pelayanan dan sebagai unsur produk pariwisata seperti jasa akomodasi, jasa transportasi, jasa hiburan, jasa tour dan travel serta pelayanan di objek wisata. Pembinaan tersebut dilakukan dengan berbagai kombinasi usaha seperti pendidikan dan latihan, pengaturan dan

[14] Gamal Suwantoro, *Dasar-dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 11

pengarahan pemerintah, pemberian rangsangan agar tercipta iklim persaingan yang sehat guna mendorong peningkatan mutu produk dan pelayanan.

b. Pembinaan masyarakat wisata

1) Menggalakkan pemeliharaan segi-segi positif dari masyarakat yang langsung maupun tidak langsung yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata.
2) Mengurangi pengaruh buruk akibat dari pengembangan pariwisata.
3) Pembinaan kerjasama baik berupa pembinaan produk wisata, pemasaran dan pembinaan masyarakat.

c. Pemasaran terpadu

Dalam pemasaran pariwisata digunakan prinsip-prinsip paduan pemasaran terpadu yang meliputi:

1) Paduan produk yaitu semua unsur produk wisata seperti atraksi seni budaya, hotel dan restoran yang harus ditumbuh-kembangkan sehingga mampu bersaing dengan produk wisata lainnya.
2) Paduan penyebaran yaitu pendistribusian wisatawan pada produk wisata yang melibatkan biro perjalanan, penerbangan, angkutan darat dan tour operator.
3) Paduan komunikasi artinya diperlukan komunikasi yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang baik tentang tersedianya produk yang menarik.

4) Paduan pelayanan yaitu jasa pelayanan yang diberikan kepada wisatawan harus baik sehingga produk wisata akan baik pula.

C. Jenis-Jenis Pariwisata

Berikut adalah jenis-jenis pariwisata, menurut Soekadijo yang terdapat di daerah tujuan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjunginya sehingga dapat pula diketahui jenis pariwisata yang mungkin layak untuk dikembangkan dan mengembangkan jenis sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata tersebut, antara lain:

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan *(pleasure tourism).*

   Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, untuk mengendorkan ketegangan syarafnya, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, untuk menikmati hiburan, dan sebagainya.

b. Pariwisata untuk rekreasi *(recreation sites)*

   Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

c. Pariwisata untuk kebudayaan *(cultural tourism)*

   Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup masyarakat negara lain dan sebagainya.

d. Pariwisata untuk olahraga *(sports tourism)*

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk tujuan olahraga, baik hanya untuk menarik penonton olahraga dan olahragawannya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktikkannya sendiri.

e. Pariwisata untuk urusan dagang besar *(business tourism)*

Dalam jenis pariwisata ini, unsur yang ditekankan adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku perjalanan ini yang menggunakan waktu-waktu bebasnya untuk menikmati dirinya sebagai wisatawan yang mengunjungi berbagai obyek wisata dan jenis pariwisata lain.

f. Pariwisata untuk konvensi *(convention tourism)*.

Banyak negara yang tertarik dan menggarap jenis pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan-bangunan yang khusus dilengkapi untuk menunjang *convention tourism*.[15]

Selanjutnya dilihat dari obyek wisata, maka Soekadijo menjelaskan bahwa obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah. Selanjutnya obyek wisata ini dikelompokkan menjadi tiga golongan :

a. Obyek wisata dan daya tarik wisata alam

Obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam.

---

[15] Soekadijo, *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Sistem Linkage*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 22

b. Obyek wisata dan daya tarik budaya

Obyek dan daya tarik bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan obyek lain yang berkaitan dengan budaya.

c. Obyek wisata dan daya tarik pada minat khusus

Obyek wisata daya tariknya bersumber pada minat khusus wisatawan itu sendiri, misalnya olah raga, memancing dan lain-lain.[16]

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tujuannya, maka pariwisata dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) bentuk antara lain pariwisata untuk menikmati perjalanan *(pleasure tourism)*, pariwisata untuk rekreasi *(recreation sites)*, pariwisata untuk kebudayaan *(cultural tourism)*, pariwisata untuk olahraga *(sports tourism)*, pariwisata untuk urusan dagang besar *(business tourism)*, dan pariwisata untuk konvensi *(convention tourism)*.

D. Pengertian Sosial Budaya

Menurut Hari Poerwanto, sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan[17]. Sosial dalam arti masyarakat atau kemasyarakatan berarti segala sesuatu yang bertalian dengan sistem hidup bersama atau atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang didalamnya sudah tercakup

---

[16] *Ibid*, h. 23

[17] Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 26

struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya[18]. Namun jika dilihat dari asal katanya, sosial berasal dari kata ”*socius*” yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) di artikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar[19].

Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar,yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa refleks, bererapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan membabi buta. Bahkan berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya (seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan berkebudayaan[20].

Budaya, kultur atau kebudayaan adalah cara atau sikap hidup manusia dalam berhubungan secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang didalamnya sudah tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik

---

[18] Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006), h. 8

[19] Hari Poerwanto, *Op Cit*, h. 30

[20] Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 2009), h. 45

yang fisik materiil maupun yang psikologis, idiil, dan spiritual[21]. Kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia bai material maupun non-material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan atau dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[21] Jacobus Ranjabar, *Op Cit*, h. 11